

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LUMAJANG
EKSOTIK

KABUPATEN LUMAJANG

Kecamatan
SUKODONO

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., sehingga Laporan Kinerja LKj IP Tahun 2023 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan. Penyusunan LKj IP Tahun 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKj IP Tahun 2023 Kecamatan Sukodono ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta P-Renstra Kecamatan Sukodono. Pada LKj IP Tahun 2023 ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Kecamatan Sukodono Tahun 2023.

Lumajang, 31 Januari 2024


CAMAT SUKODONO
KECAMATAN
SUKODONO

DIAN PURWISUDAH KHP, S.Psi, MM

NIP. 19771023 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	6
1.1.1 Letak Geografis	6
1.1.2 Topografi.....	6
1.1.3 Demografi.....	7
1.1.4 Struktur Organisasi.....	8
1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.1.6 Kepegawaian	10
1.1.7 Aset.....	13
1.1.8 Landasan Hukum.....	16
1.2 Isu Strategis Organisasi.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	18
2.2 Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	24
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya.....	27
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target P Renstra.....	29
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain.....	30
3.1.5 Beberapa Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program.....	31

3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan menghitung analisis efisiensi per indikator kinerja sasaran strategis.....	37
3.1.7	Analisa program penunjang keberhasilan.....	38
3.2	Realisasi Anggaran.....	39
3.3	Rencana Tindak Lanjut	42
3.4	Tanggapan Atasan Langsung	42
BAB IV PENUTUP		43
4.1	Kesimpulan	43
4.2	Langkah ke Depan	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN		47
L1	Perjanjian Kinerja.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Per31 Desember 2023	7
Tabel 1.2	Daftar PNS dan Tenaga Kontrak Kecamatan Sukodono Per 31 Desember 2023.....	10
Tabel 1.3	Daftar Inventaris Barang/Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2023.	13
Tabel 3.1	Capaian Indikator Tujuan & Sasaran Dan Program Kecamatan Sukodono Tahun 2023.....	24
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Sukodono.....	26
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran P Renstra Dan Realisasi Tahun 2023 Kecamatan Sukodono.....	27
Tabel 3.4	Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen.....	29
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1. LETAK GEOGRAFIS

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 30,79 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 59.198 jiwa yang tersebar di 10 Desa.

Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kedungjajang;
- Sebelah timur : Kecamatan Jatiroto;
- Sebelah selatan : Kecamatan Lumajang;
- Sebelah barat : Kecamatan Padang.

1.1.2. TOPOGRAFI

Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (Sepuluh) desa, antara lain :

1. Desa Klanting
2. Desa Kutorenon
3. Desa Bondoyudo
4. Desa Selokgondang
5. Desa Dawuhan Lor
6. Desa Selok Besuki
7. Desa Kebonagung
8. Desa Uranggantung
9. Desa Sumberejo
10. Desa Karang Sari

1.1.3. DEMOGRAFI

Tabel 1.1

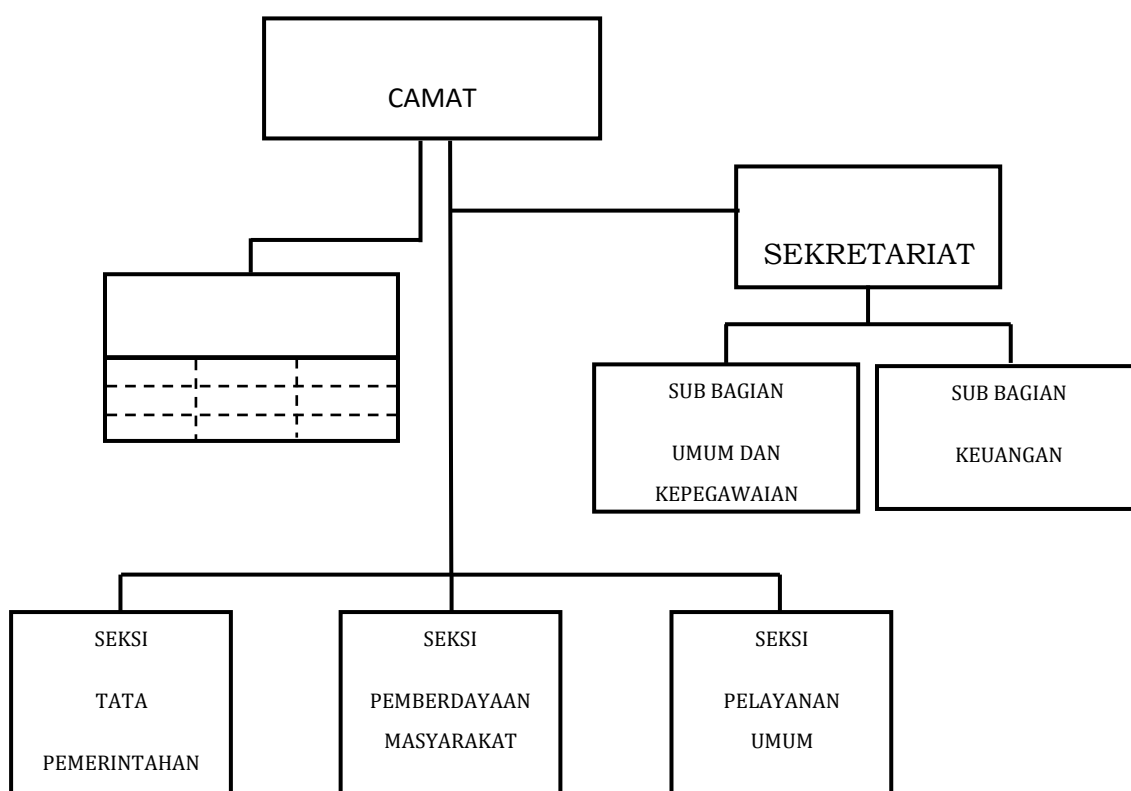
**JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN SUKODONO
s/d BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Klanting	2251	2287	4538
2	Desa Kutorenon	3180	3256	6436
3	Desa Bondoyudo	1816	1911	3727
4	Desa Selokgondang	2993	3221	6214
5	Desa Dawuhan Lor	3998	4028	8026
6	Desa Selok Besuki	2355	2477	4832
7	Desa Kebonagung	1799	1907	3706
8	Desa Uranggantung	1486	1703	3189
9	Desa Sumberejo	4209	4405	8614
10	Desa Karang Sari	3791	3905	7696
	JUMLAH	27878	29100	56978

1.1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SUKODONO



1.1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat antara lain :

A. Tugas Camat

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan

B. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.6. KEPEGAWAIAN

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Komposisi pegawai pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel 1.2
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	GOL.	JENIS KELAMIN	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN	ESELON	JABATAN
1.	DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi,MM NIP. 19771023 200501 1 009	IV / a	L	PNS	Magister (S2)	III.a - ADMINISTRATOR	CAMAT
2.	ALI WAFA NIP.19660804 199202 1 004	III / d	L	PNS	SLTA	IV.a - PENGAWAS	KASI. PELAYANAN UMUM
3.	FAIZAH, S.Pd NIP. 19701219 200903 2 001	III / c	P	PNS	Sarjana (S1)	IV.a - PENGAWAS	KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	AZ. MASHURI, SH NIP. 19690914 199403 1 008	III / d	L	PNS	Sarjana (S1)	IV.a - PENGAWAS	KASI. PEMERINTAHAN
5.	SAIFUL ANAM,S.AP NIP. 19790629 200801 1 012	III / a	L	PNS	Sarjana (S1)	IV.b - PENGAWAS	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN DAN
6.	DEWI AFRILIYANTI, SE NIP. 19790415 201001 2 014	III / b	P	PNS	Sarjana (S1)	IV.b - PENGAWAS	KASUBAG KEUANGAN
7.	ROMAWATI BIANA, S,Sos NIP. 19820623 201101 2 015	III / c	P	PNS	Sarjana (S1)	-	Pengadministrasi Umum
8.	G A N G S A R NIP. 19740714 200701 1 028	III / a	L	PNS	SLTA	-	Pengadministrasi Umum
9.	W I Y O N O NIP. 19660912 200701 1 032	II / d	L	PNS	SLTA	-	Pengadministrasi Umum

10.	IRMA HARI NOVIANSYAH NIP. 19801110 200801 1 017	II / d	L	PNS	SLTA	-	Pengadministrasi Umum
11.	BUNALI NIP. 19861108 201001 1 001	I / d	L	PNS	SLTP	-	Pengadministrasi Keuangan
12.	ENDRO KARTIKO NIP. 19670515 200901 1 002	I / d	L	PNS	SLTP	-	Pengadministrasi Umum
13.	MASHUDI NIP. 19770710 201001 1 004	I / d	L	PNS	SD	-	Pengemudi
14.	HERU PRIBADI NIP. 19811226 201001 1 002	I / c	L	PNS	SD	-	Pramu Kebersihan
15.	ERMIN SUSILOWATI ,SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	Pelayanan Umum Kecamatan
16.	HANIFAH	-	P	PTT	SLTA	-	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masya.
17.	EKO WAHYUDI	-	L	PTT	Diplom a I (D1)	-	Pelayanan Umum Kecamatan
18.	YUDHA GALIH KRISTIYANTO, SE	-	L	PTT	Sarjana (S1)	-	Administrasi Keuangan
19.	CATUR PUTRI HANDAYANI, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	Administrasi Umum Dan Kepegawaian
20.	MOCHAMAD ZAINUR ROZIKIN	-	L	PTT	SLTA	-	Administrasi Umum Dan Kepegawaian
21.	DENI MUCHAMMAD NURUL, S.Pd	-	L	PTT	SLTA	-	Petugas Kebersihan
22.	ZULFIKAR AURIZKI, SE	-	L	PTT	Sarjana (S1)	-	KORCAM Sukodono
23.	AMIR ZAQI, SE	-	L	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Uranggantung
24.	RIXMA HERMANTRY, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Selokgondang
25.	INSIYAH, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Bondoyudo

26.	HOLIFAH	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Karangsari
27.	HUDAIBIYAH, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Kutorenon
28.	RIZQI NOVIANDIKA PERMATA INDAH, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Dawuhan Lor
29.	RIA PRIHATINI, S.E	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Klanting
30.	GEMINI DWI YANTI, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Kebonagung
31.	NURMALIA ZULISTYANI, SE	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Selokbesuki
32.	YENI LIA RACHMAWATI, S.Pd	-	P	PTT	Sarjana (S1)	-	TPD Desa Sumberejo

1.1.7. ASET KECAMATAN SUKODONO

Dalam Upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukodono memiliki ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penguunjang terhadap upaya pencapaian sasaran sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini :

Tabel 1.3
DAFTAR INVENTARIS BARANG
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2023

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	AC	7
2	AC	4
3	AC / Air Conditioner	2
4	Alat Potong KTP	1
5	Almari Buku	1
6	Almari Es (Kulkas)	1
7	Almari Kayu	3
8	Backdrop Tulisan "PATEN"	1
9	Bangku Tunggu	2
10	Brankas	1
11	Dispenser	1
12	Faximel	1
13	Filing Cabinet	1
14	Generating Set (Genset)	1
15	Gordyn	16
16	K o m p u t e r	1
17	Kamera Digital	2
18	Karpet Lantai	3
19	Kelengkapan Komputer	1
20	Keyboard Laptop	1
21	Kipas Angin	7
22	Komputer	12
23	Komputer (PC)	3
24	Komputer / PC	1
25	Komputer PC	4
26	Komputer-PC	1
27	Kursi Eselon III A	1
28	Kursi Kerja Eselon III	1

29	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	8
30	Kursi Pelayanan	6
31	Kursi Putar	13
32	Kursi Putar : Rapat	6
33	Kursi Roda	1
34	Kursi Tamu / ZICE	1
35	Kursi Tunggu 4 set	2
36	Laptop	4
37	Laptop : DELL	1
38	LCD Proyektor	2
39	Lemari	1
40	Lemari Arsip	2
41	Lemari besi	2
42	Lemari Es	1
43	Lemari Kayu	1
44	Meja & kursi Eselon III B	1
45	Meja Eselon III A	1
46	Meja Kayu	2
47	Meja Kerja	3
48	Meja Kerja Eselon III	1
49	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	8
50	Meja Kerja PKK	6
51	Meja Komputer	1
52	Meja Kursi	1
53	Meja Kursi Tamu / Zice	1
54	Meja Kursi Tamu/Sofa	1
55	Meja Makan	1
56	Meja Operator Komputer	2
57	Meja Pelayanan	2
58	Meja Podium	1
59	Meja Rapat	1
60	Meja Rapat Panjang	2
61	Mesin Ketik	4
62	Mesin Laminating	1
63	Monitor	1
64	Neon Box / Papan Nama	1
65	P r i n t e r	1
66	Papan Data	1
67	Peralatan Komputer	1
68	Pesawat Telephone	1
69	Portable Generating Set	1
70	Printer	19
71	Printer : Canon	4

72	Printer : Epson L-100	2
73	Printer : IP.2700	1
74	Printer Canon	1
75	Printer Dot Matrix	2
76	Printer Laserjet	1
77	Printer Pixma	2
78	Radio VHF	1
79	Rak Buku	2
80	Rak Buku : Kayu	1
81	Rak Kayu	2
82	Router	1
83	Seketsel (Batas Ruangan)	1
84	Sepeda Motor	5
85	Sound System	2
86	Station Wagon	1
87	STAVOLT	1
88	T e l e v i s i	1
89	Tabung Pemadam Kebakaran	2
90	Tangga Almunium	1
91	Tangga Almunium Ukuran 6 m	1
92	Tape Recorder	1
93	Taplak Meja Pajang	2
94	Televisi	1
95	Televisi / TV	2
96	Tempat Tidur	1
97	TV Flat 40	1
98	TV LED 40"	1
99	UPS	10

1.1.8 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. ISU STRATEGI ORGANISASI

Dalam usaha memenuhi target kinerja Tahun 2023, Kecamatan Sukodono masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu pada tahun 2022. Dari analisa yang sudah dilakukan ada beberapa permasalahan isu strategis Kecamatan Sukodono, ada beberapa penyebab dari tidak tercapainya target tersebut antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait prosedur atau alur pelayanan yang ada di kecamatan.
2. Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti.
3. Kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa dalam ketepatan waktu pelaporan administrasi desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dari Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur dan Berdaya Saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang dijalankan oleh kecamatan Sukodono secara keseluruhan adalah Reformasi Birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukodono, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dengan indikator tujuan Nilai IKM Kecamatan Sukodono
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah :
 - 1) Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
 - 2) Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

TARGET KINERJA TUJUAN KECAMATAN SUKODONO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Sukodono	83,34 %

2.2. URAIAN RINGKAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono mengalami 3 kali perubahan yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN SUKODONO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	93 %	93 %
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90%	90%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	79,5%	79,5%

3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	79,2%	79,2%
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	79,2%	79,2%
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,2%	79,2%
6	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79,2%	79,2%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79,2%	79,2%
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79,2%	79,2%

NO	Program	Anggaran Awal	Anggaran setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.986.851.533	Rp 1.851.788.266
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.250.000	Rp. 10.250.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 197.720.000	Rp 136.220.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 252.600.000	Rp 252.106.000
	JUMLAH	Rp 2.459.821.533	Rp 2.262.764.266

Ada 3 Program yang mengalami perubahan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada :
 - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 113.820.149,-
 - Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada :
 - Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp 1.500.000,-
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. 2.000.000,-
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 1.400.000,-
 - f. Belanja Modal pada Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp. 8.364.738,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pada :
 - Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan sebesar Rp. 750.000,-
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 750.000,-
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 494.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

TABEL 3.1
CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN DAN PROGRAM
KECAMATAN SUKODONO TAHUN 2023

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Sukodono	83,34%	90,16%	108%
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	85%	91,4%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90%	100%	111%
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	79,5%	100%	125,7%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	79,2%	100%	126%

4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	79,2%	100%	126%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,2%	100%	126%
6.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79,2%	100%	126%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79,2%	100%	126%
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79,2%	100%	126%

Untuk tahun 2023, Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti. Untuk indikator ini diperoleh dari jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitas dan koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Sukodono dikalikan 100%, sebagaimana berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitas dan Koordinasi yang dilakukan dengan Intansi / Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$$

Adapun fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan Sukodono secara keseluruhan berjumlah 60 fasilitasi dan koordinasi dan dari jumlah tersebut sampai dengan akhir tahun 2023 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 51 fasilitasi dan koordinasi, sehingga diperoleh hasil realisasi, sebagai berikut :

$$\frac{51}{60} \times 100\% = 85\%$$

dari rumus di atas dapat diketahui pencapaian target realisasi Kecamatan Sukodono di tahun 2023 untuk Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 85% dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 91,4%.

Sedangkan untuk rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu diketahui sebagai berikut. Di Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (sepuluh) desa, dimana setiap desa diwajibkan menyusun RKPDes, APBDes dan LPPDes. Dokumen tersebut harus disusun oleh setiap desa yang mana nantinya akan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

Dari laporan yang kami terima untuk pemenuhan penyusunan ke tiga dokumen dari masing-masing desa dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen
Tahun 2023

No.	Jenis Dokumen	Jumlah Desa	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu
1	RKPDes	10	10	-
2	APBDes	10	10	-
3	LPPDes	10	10	-

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya untuk semua dokumen baik itu RKPDesa, APBDEsa dan LPPDesa dapat terakomodir dengan baik dan tepat waktu meskipun harus tetap ada penyempurnaan dan pendampingan secara berkesinambungan. Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk Kecamatan Sukodono rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDEsa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$$

$$\frac{(10 \text{ desa} + 10 \text{ desa} + 10 \text{ desa})}{(3 \text{ dokumen} \times 10 \text{ desa})} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Sukodono sudah menunjukkan peningkatan kedisiplinan untuk ketepatan waktu dalam penyusunan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian pendampingan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan harus tetap dilaksanakan supaya kedepannya tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Realisaasi dari sasaran ini sebesar 100% dan pencapaian target kinerja sebesar 111%.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Indikator Kinerja	Target Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Perangkat Daerah Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai IKM Kecamatan	78,50	78,70	78,90	82,50	83,34	79,50	80,94	78,90	83,34	90,16

2	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,00	89,00	90,00	92,00	93,00	94,18	96,72	90,00	72,00	85,00
3	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60	96,60	96,60	84,00	90,00	53,33	100,00	96,60	66,00	100,00

Untuk pencapaian target indicator tujuan jika di lihat dari pencapaian realisasi pertahun cenderung meningkat karena setiap tahun Kecamatan Sukodono selalu berusaha meningkatkan kapasitas pelayanan baik dari segi kemampuan SDM, peningkatan saran prasarana dan inovasi-inovasi pelayanan yang selalu mengikuti tuntutan dan perkembangan jaman tentunya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Sedangkan untuk indicator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dari target yang ditetapkan, jika di lihat dari permasalahanya hal ini dikarenakan karena kurang adanya pendampingan yang berkesinambungan secara maksimal dari pihak kecamatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke desa di tambah lagi dengan kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa dalam ketepatan waktu pelaporan administrasi desa.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target P Renstra

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN P RENSTRA dan REALISASI TAHUN 2023
KECAMATAN SUKODONO

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai IKM Kecamatan	83,34	90,16	108
2.	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,00	85,00	91,4
3.	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00	100,00	111

Jika dilihat dari pencapaian target indicator tujuan, realisasi sudah melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini tentunya didukung dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukan yang di butuhkan, dengan datang secara langsung maka masyarakat bisa mengetahui kemudahan-kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan hal ini bisa menjadi salah satu media sosialisasi secara tidak langsung.

Jika dilihat dari pencapaian target indicator sasaran, untuk Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti tidak sesuai dengan target yang di harapkan karena ada beberapa fasilitasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak desa, tidak dilaksanakan ini bukan berarti tidak melaksanakan kewajiban tetapi jenis fasilitas yang tidak tercapai ini dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi yang sifatnya kondisional sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk pencapaian Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah menunjukkan hasil yang baik berkat adanya pendampingan yang maksimal dan berkesinambungan baik dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan administrasi kegiatan desa.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain

Tabel 3.2
Capain IKU Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus/Formula	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	83	84,92	102,32%
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	Laporan Kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi, dan Notulen para Kepala Seksi	92%	86,00%	93,48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)	Dokumen APBDes, RKPDes dan LPPDes	90,9%	84,85%	93,34%

Capaian IKU Kecamatan Sukodono Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus/Formula	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Kecamatan Sukodono	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	83,34	90,16	108
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi	Laporan kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi dan notulen Kasie	93	85	91,4
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa	Dokumen APBDes, RKPDes dan LPPDes	90	100	111

Jika dilihat dari pencapaian target kinerja Kecamatan Ranuyoso tidak jauh berbeda dengan pencapaian target di kecamatan Sukodono, hal ini bisa di pengaruhi karena memang kita sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada dengan di dukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang kurang lebih sama. Kecamatan Sukodono sedikit lebih unggul bisa jadi karena dukungan dan karakteristik dari masyarakat dan perangkat desa yang ada.

3.1.5 Beberapa Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Sukodono bisa di lihat dari uraian di bawah ini :

A. Analisa Indikator Tujuan

a. Faktor penyebab keberhasilan dari indicator tujuan antara lain :

1. Adanya peningkatan kualitas SDM di bagian pelayanan dengan banyak mengikuti webinar.
2. Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.
3. Adanya transparansi dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan adanya sosialisasi dan banner SOP dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
4. Adanya koordinasi yang baik antar ASN di lingkungan intern Kecamatan Sukodono dalam menunjang keberhasilan pelayanan masyarakat.
5. Selalu berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang tentunya di sesuaikan dengan anggaran.

b. Faktor penghambat keberhasilan dari indicator tujuan antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait prosedur atau alur pelayanan yang ada di kecamatan.
2. Kurang kompetenya SDM dalam bidang pelayanan.

3. Kualitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam bidang pelayanan.
 4. Masih adanya masyarakat yang memanfaatkan jasa calo dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
 5. Adanya ego sektoral antar bidang di intern kecamatan.
- c. Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
1. Diwajibkan mengikuti webinar yang bertemakan dengan pelayanan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan pelayanan prima.
 2. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung bidang pelayanan.
 3. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan sosialisasi ke desa-desa terkait bidang pelayanan.
 4. Transparansi dalam bidang pelayanan dengan menggunakan spanduk atau banner terkait SOP pelayanan.
 5. Membuat inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam bidang pelayanan yang tentunya yang tidak menyalahi aturan.

B. Analisa Indikator Sasaran

- a. Faktor penyebab keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :
1. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 2. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat.

3. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan.
- b. Faktor penghambat keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :
1. Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti.
 2. Kualitas SDM pemerintah desa yang kurang mumpuni.
 3. Kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dokumen yang dikumpulkan tepat waktu.
 4. Minimnya pengetahuan aparat desa terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen administrasi desa.
- c. Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi yang perlu di tindaklanjuti.
 2. Dilakukan pendampingan, pembinaan dan evaluasi secara berkesinambungan kepada perangkat desa terkait pengadministrasian pelaporan kegiatan desa.
 3. Memberikan wawasan kepada Kepala dan perangkat desa terkait ketentuan kebijakan pemerintahan desa.
 4. Menyarankan kepada perangkat desa untuk mengikuti webinar yang terkait dengan pengadministrasian pemerintahan desa.

C. Analisa indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
 - Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota antara lain :
 - a. Memaksimalkan perencanaan.

- b. Melakukan pelaksanaan kinerja dan anggaran sesuai time schedule kecamatan.
 - c. Adanya kerjasama yang baik antar kasi dan sub. bagian.
 - d. Adanya Kerja sama yang baik antar lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Perencanaan yang kurang maksimal.
 - b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan skedul.
 - c. Tidak ada koordinasi antar kasi, sub. Bagian dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Dalam proses perencanaan melibatkan semua kasi dan kasubag dalam penentuan kegiatan, sub. Kegiatan, aktivitas dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan skedul kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya peningkatan kualitas SDM di bidang pelayanan.
 - b. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan.
 - c. Adanya tranparansi dan kejelasan alur pelayanan yang di sosialisasikan baik secara langsung ke masyarakat, melalui banner dan bosur maupun media social.
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukan yang di butuhkan, dengan datang

secara langsung maka masyarakat bisa mengetahui kemudahan-kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan hal ini bisa menjadi salah satu media sosialisasi secara tidak langsung.

- Faktor penghambat keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. SDM yang kurang berkompeten dalam bidang pelayanan.
 - b. Tidak adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Masyarakat kurang memahami alur pelayanan karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
- Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Diwajibkan untuk mengikuti webinar dengan tema yang berkaitan dengan bidang pelayanan.
 - b. Mengajukan pengadaan dan pemeliharaan untuk pendukung sarana dan prasarana.
 - c. Sosialisasi baik secara langsung ke desa-desa atau melalui media social, banner dan brosur.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - b. Adanya pendampingan dari kecamatan untuk desa dalam penyelesaian administrasi desa dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

- Faktor penghambat keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
 - b. Kurangnya pendampingan dari pihak kecamatan untuk desa dengan kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
- Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
 - b. Memaksimalkan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indikator program antara lain :

a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.

➤ Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :

a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

➤ Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :

a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.

b. Pelaksanaan Binwas terpadu dengan maksimal.

➤ Faktor penghambat keberhasilan dari indikator program antara lain :

a. Belum maksimalnya pembinaan, evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh kecamatan ke desa.

➤ Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :

a. Dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan mulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan menghitung analisis efisiensi per indikator kinerja sasaran strategis OPD saja :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	85%	91%	target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86.67%	100%	115%	target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan
Capaian Rata-rata					91%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113	DAU	96%	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 10,250,000	Rp 10,223,000	DAU	100%	1
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 136,220,000	Rp 135,000,000	DAU	99%	1
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	DAU	100%	1
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	DAU	100%	1
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 252,106,000	Rp 251,675,000	DAU	100%	1
Jumlah		Rp 2,187,340,928	Rp 2,122,964,113		97%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Camat Sukodono


DIAN NURWISUDAH JGP, S.Ps.LMM
NIP. 19771023 200501 1 009

- a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan focus sesuai dengan tupoksi dari masing-masing ASN;
- b. Memberikan kesempatan kepada masing-masing ASN untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan kecamatan untuk menambah pengalaman dan wawasan;
- c. Dilakukan roling staf ASN pada semua bagian dengan harapan selalu siap jika ada perubahan tupoksi;
- d. Dianjurkan untuk mengikuti webinar guna menambah pengetahuan.

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun saku di Kecamatan Sukodono, dan akan dilakukan perubahan jika cara tersebut masih mencapai target yang ditentukan.

3.1.7 Analisa progam penunjang keberhasilan

NO	Program	Capaian	Keterangan	
			Mendukung secara langsung	Mendukung secara tidak langsung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	96%	√	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	√	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	99%	√	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	√	

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	√	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	√	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Sukodono. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Sukodono dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Sukodono untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TW IV	SISA ANGGARAN
1		2	3	7	8 = 3 - 7
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.903.063.457	1.776.364.928	1.713.666.113	62.698.815
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	9.500.000	9.210.000	290.000
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	2.986.000	14.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1.975.000	25.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1.992.000	8.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	2.257.000	243.000

KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.561.321.265	1.446.501.136	332.129.101	51.068.988
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.530.709.265	1.416.889.136	1.365.820.148	51.068.988
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.612.000	27.612.000	27.612.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.480.000	6.480.000	6.360.000	120.000
SUB. KEGIATAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	6.480.000	6.480.000	6.360.000	120.000
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.242.082	44.242.082	42.855.350	1.386.732
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.428.569	2.428.569	2.414.500	14.069
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.948.363	22.948.363	22.323.600	624.763
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.815.150	8.815.150	8.067.250	747.900
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.050.000	9.050.000	9.050.000	-
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.684.218	45.684.218	40.695.375	4.988.843
SUB. KEGIATAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	672.660	672.660	-	672.660
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	45.011.558	45.011.558	40.695.375	4.316.183
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.412.000	215.433.600	207.200.115	8.233.485
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.060.000	45.060.000	36.866.858	8.193.142
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.352.000	170.373.600	170.333.257	40.343
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.535.450	53.535.450	52.608.500	926.950
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.985.450	33.985.450	33.275.500	709.950
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.550.000	19.550.000	19.333.000	217.000
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.250.000	10.250.000	10.223.000	27.000

KEGIATAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.250.000	5.250.000	5.225.000	25.000
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	5.250.000	5.250.000	5.225.000	25.000
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5.000.000	5.000.000	4.998.000	2.000
SUB. KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5.000.000	5.000.000	4.998.000	2.000
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	197.720.000	136.220.000	135.000.000	1.220.000
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	183.720.000	122.220.000	121.030.000	1.190.000
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	750.000	750.000	750.000	-
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	5.520.000	4.770.000	4.770.000	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177.450.000	116.700.000	115.510.000	1.190.000
KEGIATAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14.000.000	14.000.000	13.970.000	30.000
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14.000.000	14.000.000	13.970.000	30.000
PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
KEGIATAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
SUB. KEGIATAN	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah -Kecamatan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-

KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-
SUB. KEGIATAN	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-
PROGRAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	252.600.000	252.106.000	251.675.000	431.000
KEGIATAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	252.600.000	252.106.000	251.675.000	431.000
SUB. KEGIATAN	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	252.600.000	252.106.000	251.675.000	431.000
	JUMLAH TOTAL PROGRAM	2.459.821.533	2.262.764.266	2.193.747.488	69.016.778

3.3 RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya guna pencapaian target yang sudah ditentukan.

3.4 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Ada 2 indikator sasaran yang menjadi target dari Kecamatan Sukodono yang mendukung pencapaian indikator tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana pada tahun 2023 ini sudah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya antara lain :
 1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 91,4%.
 2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah desa tepat waktu sebesar 111%.
3. Dan ada 10 indikator kinerja dari program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono yang terbagi ke 3 Kasie dan 2 Sub. Bagian, dimana pada tahun 2023 sudah terserap sebesar 96,95%.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja untuk sasaran antara lain:

- a. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan terkait fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh desa sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat;
- c. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti;
- d. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan;
- e. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan, pengadministrasian sampai dengan pelaporan kegiatan ke desa-desa di dukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi anggaran per program antara lain :

- 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
- 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
- 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan;
- 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa;
- 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu;
- 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi;
- 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;

8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan;
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran;
10. Mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran;
11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat;
12. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten;
14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;
16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
21. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
22. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidaktepat waktu;

23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan;
25. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman, Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan dan Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

Lumajang, 31 Januari 2024

CAMAT SUKODONO



DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM

NIP. 19771023 200501 1 009

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a. PK Januari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : H. THORIQUH HAQ, M.ML.
Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


H. THORIQUH HAQ, M.ML.


Lumajang, 10 Januari 2023
PERTAMA

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP

UMAJIB 0702 199311 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	72%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	66%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	79,2%
3	Meningkatnya pemenuhan urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	81%
4	Meningkatnya desa tertib administrasi	Persentase desa tertib administrasi	63%

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.986.851.533
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.250.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 197.720.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 252.600.000
JUMLAH		Rp 2.459.821.533

Lumajang, 10 Januari 2023


H. THORIQUL HAQ, M.ML.


INDRIONO, RISHNA MURTI, AP
 NID. 60702 199311 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUKODONO**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	79,5%
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	79,2%
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	79,2%
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,2%
6	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79,2%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79,2%
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79,2%

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.986.851.533
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.250.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 197.720.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 252.600.000
JUMLAH		Rp 2.459.821.533


 BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Lumajang, 2 April 2023
 CAMAT SUKODONO


DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
 NIP. 19771023 200501 1 009

c. PK Perubahan Oktober 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM
Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 2 Oktober 2023
Pihak Pertama

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	79,5%
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	79,2%
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	79,2%
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,2%
6	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	79,2%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79,2%
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	79,2%

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.851.788.266
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.250.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 136.220.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 252.106.000
JUMLAH		Rp 2.262.764.266

Lumajang, 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

KECAMATAN SUKODONO

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM
 NIP. 19771023 200501 1 009

2. Dokumentasi Kegiatan





3. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	85%	91%	target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86.67%	100%	115%	target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan
Capaian Rata-rata					91%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113	DAU	96%	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 10,250,000	Rp 10,223,000	DAU	100%	1
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 136,220,000	Rp 135,000,000	DAU	99%	1
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	DAU	100%	1
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	DAU	100%	1
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 252,106,000	Rp 251,675,000	DAU	100%	1
Jumlah		Rp 2,187,340,928	Rp 2,122,964,113		97%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Camat Sukodono



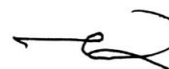
DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM
NIP. 19771023 200501 1 009

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	100%	108%	pelaksanaan Januari s/d Desember 2022
Capaian Rata-rata					108%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113	DAU	96%	1
Jumlah		Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113		96%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Pt. Sekretaris Kecamatan



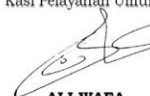
AZ MASHURI, SH
NIP. 19690914 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Desa
					Capaian Rata-rata	100%

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 10,250,000	Rp 10,223,000	DAU	100%	1
JUMLAH		Rp 10,250,000	Rp 10,223,000		100%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Kasi Pelayanan Umum



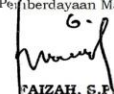
ALI WAFA
NIP. 19660804 199202 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Fasilitas Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54	100%	100%	pokmas
		Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan	560	100%	100%	Orang
		Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan	10	100%	100%	Desa
		Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10	100%	100%	Usulan
					Capaian Rata-rata	100%

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 136,220,000	Rp 135,000,000	DAU	99%	1
JUMLAH		Rp 136,220,000	Rp 135,000,000		99%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



FAIZAH, S.Pd.
NIP. 14701219 200903 2 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10	100%	100%	Desa
		Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10	100%	100%	Desa
		Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10	100%	100%	Desa
2	Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan ketertiban	10	100%	100%	Desa
		Jumlah Satgas Terbina ketentraman dan Ketertiban	10	100%	100%	Desa
Capaian Rata-rata					100%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	DAU	100%	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	DAU	100%	1
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 252,106,000	Rp 251,675,000	DAU	100%	1
Jumlah		Rp 264,506,000	Rp 264,075,000		100%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Kasi Pemerintahan



AZ MASHURI, SH
NIP. 19690914 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun	24	98%	98%	Jenis
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	41	98%	98%	Unit
Capaian Rata-rata					98%	

Sukodono, 31 Desember 2023
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SAITUL ANAM, S.AP
NIP. 19790629 200801 1 012

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG KEUANGAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	100%	100%	4 Bandel
2	Meningkatnya hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang sesuai pedoman	Jumlah dokumen perencanaan keuangan	1	100%	100%	20 Bandel
Capaian Rata-rata					100%	

Sukodono, 31 Desember 2023
KASUBAG KEUANGAN



DEWI AFRILIYANTI, SE
NIP. 19790415 201001 2 014